

# Angelina Dos Santos

*by* UNITRI Press

---

**Submission date:** 13-Oct-2022 10:14AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1896478337

**File name:** Angelina\_Dos\_Santos.docx (43.25K)

**Word count:** 951

**Character count:** 6664

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA KELURAHAN UNTUK  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
PADA KANTOR KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU  
KOTA MALANG**

SKRIPSI

AKUNTANSI



Disusun Oleh :

**ANGELINA DOS SANTOS  
NIM : 2018110002**

## ABSTRAK

Tujuan dari riset yang dilakukan ini bertujuan menganalisa Efektivitas pengelolaan anggaran dana kelurahan untuk meningkatkan pembangunan sarana serta prasarana pada kantor lurah Tlogomas yang berada di Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan fokus penelitian yaitu melakukan penelitian berkaitan dengan efektivitas dalam perkembangan sarana dan prasarana yang merupakan salah satu pencapaian dalam meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik. Riset yang dilakukan menggunakan pendekatan secara kualitatif deskriptif untuk merefleksikan perkembangan sarana serta prasarana oleh Pemerintah Daerah Kelurahan Tlogomas. Hasil yang didapatkan yaitu secara umum proses dalam dana anggaran yang dikelola oleh pemerintah setempat telah sesuai dan terlaksana dengan efektif meskipun dalam pengawasannya ditemui masih belum efektif dimana ditandai dengan evaluasi yang tidak mengikutsertakan warga desa. Pemerintah kelurahan perlu untuk mengikutsertakan masyarakat dalam evaluasi yang dilakukan sehingga masyarakat dapat melihat transparansi kinerja pemerintah.

***Kata kunci: Efektivitas, pengelolaan dana anggaran kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana.***

**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri yaitu Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 yang mengatur mengenai operasi pembangunan sarana & prasarana yang dilakukan di wilayah kelurahan, berdasarkan pasal 3 (1) dijelaskan yaitu pembangunan tersebut merupakan wujud dari layanan publik untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di desa. Maka keterwujudan kesejahteraan tersebut merupakan program prioritas yang dirancang oleh Pemerintah untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 menjelaskan mengenai tujuan dari pembangunan daerah yaitu sebagai wujud mensejahterakan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran secara spiritual dan material. Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk dapat mengatur wilayahnya sendiri untuk memenuhi kepentingan masyarakatnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebelum terdapat anggaran kelurahan, dana yang didapatkan berasal dari dana alokasi umum yang dimiliki oleh pusat. Dana tersebut diberikan kepada kota dan kabupaten yang kemudian diberikan kepada kecamatan. Namun pada tahun 2019 dana kelurahan telah memiliki dasar hukum yang dapat digunakan sebagai upaya peningkatan dalam kualitas dan kuantitas kehidupan warga desa dan menyelesaikan permasalahan di wilayah berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2019 Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai anggaran kelurahan yang dinamakan anggaran khusus kelurahan (AKK) yang berasal dari APBD dengan persentase sebesar

5% setelah dikurang <sup>6</sup> dana alokasi khusus untuk masing-masing kota dan kabupaten. Peraturan mengenai dana tersebut berasal dari asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia dimana melakukan usulan terhadap Presiden untuk mengupayakan dana kelurahan yang dinilai dapat membantu secara signifikan terhadap perekonomian warga. Berdasarkan pada pesan yang disampaikan oleh asosiasi tersebut mengutarakan bahwa beberapa kelurahan memiliki mata pencaharian dan karakteristik ekonomi yang menyerupai dengan desa.

Dana kelurahan ini memiliki tujuan dalam memberi dukungan pada Pemerintah Daerah untuk dapat memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang ada dalam wilayah kelurahan, meningkatkan kualitas hidup dari warga setempat serta mampu untuk meningkatkan ekonomi sekitar. Pemerintah pusat mengeluarkan Permendagri No. 130 Tahun 2018 yang mengatur mengenai pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah kelurahan berkaitan dengan sarana dan prasarana. PP No. 17 Tahun 2018 pada pasal 30 (1) yang mengatur mengenai Kecamatan menjelaskan mengenai alokasi dari dana APBD dalam melakukan pembangunan sarana serta prasarana di wilayahnya guna meningkatkan pemberdayaan warga sekitar.

Berdasarkan pada UU No 33 Tahun 2004 menjelaskan mengenai seluruh dari belanja daerah harus memprioritaskan pada peningkatan dan melindungi kualitas hidup masyarakat. Maka diperlukan anggaran kepada kelurahan berdasarkan pada APBD. Kelurahan adalah satuan dari pemerintahan terkecil dalam lingkup wilayah pemerintah. Maka keberhasilan dari sebuah pembangunan akan membuat pengaruh langsung terhadap masyarakat sekitar. Maka masyarakat perlu untuk diikutsertakan dalam perencanaan dan proses lainnya dalam pembangunan daerah untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan sebagai wujud transparansi Pemerintah dalam bekerja untuk kesejahteraan bersama.

Kelurahan secara yuridis formal diatur berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai wilayah kelurahan dalam tatanan pemerintahan. Kelurahan pulau adalah pemerintahan terkecil dalam tatanan pemerintahan di Indonesia dimana memiliki hak dalam melakukan pengelolaan dan mengatur anggarannya sendiri dengan tujuan peningkatan kualitas dari kehidupan warga setempat serta sebagai wujud dalam implementasi otonomi. Penganggaran yang didapatkan kelurahan berdasarkan <sup>8</sup> pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 dengan 5% dari APBD.

Anggaran yang dikelola oleh pemerintah kelurahan perlu mencakup merencanakan, melaksanakan, melakukan tata usaha, melaporkan dan mempertanggungjawabkan terhadap program yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan mengenai pembangunan sarana serta prasarana yang dibuat perlu disetujui oleh masyarakat yang dibahas dalam musrembangkel. Sehingga pembangunan yang direncanakan dapat berjalan dengan efektif serta memberikan kemanfaatan yang sebaik-baiknya dalam peningkatan kesejahteraan warga setempat.

<sup>7</sup> Berdasarkan pada penjelasan diatas maka peneliti memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian yang memiliki judul “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA KELURAHAN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PADA KANTOR KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG”.

### <sup>3</sup> 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Bagaimana proses kelola anggaran kelurahan dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pada kantor Kelurahan Tlogomas?
2. Bagaimana dampak dari pengelolaan anggaran kelurahan dalam meningkatkan pembangunan sarana serta prasarana pada kantor kelurahan Tlogomas?
3. Bagaimana pembangunan sarana serta prasarana di Kelurahan Tlogomas?

### <sup>1</sup> 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah disusun, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan anggaran dana kelurahan untuk peningkatan pembangunan sarana serta prasarana di kantor Kelurahan Tlogomas?
2. Untuk mengetahui dampak dari kelola anggaran kelurahan dalam meningkatkan pembangunan sarana serta prasarana pada kantor Kelurahan Tlogomas?
3. Untuk mengetahui pembangunan sarana serta prasarana pada Kelurahan Tlogomas?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi instansi  
Untuk sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam, pengelolaan anggaran dana kelurahan dan untuk dasar Lurah dan stafnya dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pada kantor kelurahan.
2. Bagi Peneliti  
Menambah Ilmu Pengetahuan yang memiliki kaitan pada pengelolaan dana kelurahan.
3. Bagi Universitas  
Dapat menambah referensi karya ilmiah khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan untuk bahan referensi Mahasiswa yang memiliki ketertarikan penelitian yang sama yaitu pengelolaan anggaran dana kelurahan.

# Angelina Dos Santos

---

## ORIGINALITY REPORT

---

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="https://repository.upi.edu">repository.upi.edu</a> Internet Source	2%
2	<a href="https://eprints.ipdn.ac.id">eprints.ipdn.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="https://etd.umy.ac.id">etd.umy.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="https://sinta.unud.ac.id">sinta.unud.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
6	Santi Rahma Dewi. "Flypaper Effect, PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Di Indonesia.", <i>Journal of Accounting Science</i> , 2017 Publication	1%
7	<a href="https://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://journal.ipb.ac.id">journal.ipb.ac.id</a> Internet Source	1%

---



---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On